

DINAMIKA KEBIJAKAN PUBLIK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI BANK SAMPAH JAKARTA TIMUR

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika kebijakan publik dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Anyelir Jakarta Timur dengan menggunakan teori politik lingkungan, teori triple helix, dan teori partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder dari hasil wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan masalah peningkatan jumlah dan jenis sampah mengakibatkan berbagai permasalahan sosial dan lingkungan. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022 menunjukkan bahwa 35,48% dari total 69,2 juta ton sampah di Indonesia belum terkelola dengan baik. DKI Jakarta, sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia, menghadapi tantangan serupa dengan volume sampah yang tinggi dan keterbatasan lahan untuk pembuangan sampah yang memunculkan tekanan pada Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) seperti TPA Bantargebang. Dalam upaya mengatasi masalah ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan Peraturan Gubernur No. 77 Tahun 2020 yang mewajibkan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga.

Bank Sampah Anyelir di Jakarta Timur menjadi salah satu inisiatif untuk mengurangi dampak buruk sampah terhadap lingkungan. Namun, meskipun telah beroperasi selama 10 tahun, bank sampah ini masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam hal biaya operasional yang bergantung pada penjualan hasil daur ulang dengan margin keuntungan yang kecil. Pemerintah hanya memberikan bantuan terbatas dalam bentuk barang seperti timbangan dan tong kompos tanpa dukungan dana operasional yang substansial. Kurangnya dukungan ini mempengaruhi efisiensi dan keberlanjutan bank sampah, yang dapat mengancam kelangsungan program mereka. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah juga masih menjadi tantangan utama, terutama karena kesibukan dan kurangnya kesadaran masyarakat. Untuk itu dibutuhkan peningkatan edukasi masyarakat dan mengembangkan model keuangan yang berkelanjutan bagi bank sampah, serta memperkuat kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan di masa depan.

Kata Kunci: Sampah, Bank Sampah, DKI Jakarta, Kebijakan Publik, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Sampah

***THE DYNAMICS OF PUBLIC POLICY AND COMMUNITY PARTICIPATION
IN WASTE MANAGEMENT AT EAST JAKARTA WASTE BANK.***

ABSTRACT

This study aims to explore the dynamics of public policy and community participation in waste management at Bank Sampah Anyelir Jakarta Timur using environmental policy theory, triple helix theory, and community participation theory. The research employs a descriptive qualitative approach utilizing primary and secondary data from interviews, observations, and literature reviews. The findings indicate issues arising from the increasing quantity and types of waste leading to various social and environmental problems. Data from the Ministry of Environment and Forestry in 2022 reveals that 35.48% of Indonesia's total 69.2 million tons of waste remains improperly managed. DKI Jakarta, as one of Indonesia's largest metropolitan cities, faces similar challenges with high waste volumes and limited landfill space, placing pressure on Final Waste Disposal Sites (TPA) like TPA Bantargebang. In addressing these challenges, the Jakarta Provincial Government implemented Governor Regulation No. 77 of 2020 mandating household waste separation. Bank Sampah Anyelir in East Jakarta represents an initiative to mitigate the adverse environmental impacts of waste. However, despite operating for 10 years, the waste bank still encounters significant challenges, particularly in operational costs reliant on meager profits from recycling sales. The government's support has been limited to providing items such as scales and compost bins without substantial operational funding. This lack of support affects the efficiency and sustainability of waste banks, jeopardizing their continuity. The importance of community participation in waste management remains a significant challenge, primarily due to community busyness and awareness gaps. Therefore, there is a need to enhance community education, develop sustainable financial models for waste banks, and strengthen collaboration among government, communities, and the private sector to create an effective and sustainable waste management system in the future.

Keywords: Waste, Waste Bank, DKI Jakarta, Public Policy, Community Participation, Waste Management